

Implementasi Nilai Nilai Kebangsaan UUD 1945 Sebagai Terapan Analisis Dampak Pendapatan Negara Pada Kegiatan Industri Migas di Indonesia

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Rizky Andreanusa

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Bismaka Daniswara

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

Korespondensi Penulis: edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

***Abstract:** Indonesia in carrying out obligations and daily activities. Both in personal life, social life, and even the wealth that exists on earth. The 1945 Law as a legal basis for the impact of state revenues on oil and gas industry activities in Indonesia is expected to be implemented in aspects of the oil and gas industry. This regulation is contained in Market 3 No. 22 of 2001 which regulates the objectives of implementing the oil and gas industry. State income is a crucial concern in the development and economy of a country as well as in improving the quality of life of citizens as a whole. As a country that has abundant natural resource wealth, especially oil and natural gas, Indonesia relies on oil and natural gas income as a form of income for the development and welfare of the people. The implementation of national values in the 1945 Constitution is reflected in the government's efforts to ensure that oil and gas industry activities contribute maximally to state income, while still paying attention to environmental sustainability and community welfare. The impact of state revenues from the oil and gas industry in Indonesia is greatly influenced by regulations and policies implemented by the government, including in terms of natural resource management, distribution of production results, and tax and royalty revenues. Apart from that, protecting consumer rights and environmental sustainability are also main concerns in implementing national values in the context of the oil and gas industry.*

Keywords: 1945 Constitution, Economy, Oil and Gas

Abstrak: Undang-Undang 1945 yang ada di Indonesia menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kewajiban maupun aktivitas sehari-hari. Baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan bersosial, hingga kekayaan yang ada dalam bumi. Undang-Undang 1945 Sebagai landasan hukum terhadap dampak pendapatan negara pada kegiatan industri migas di Indonesia diharapkan dapat di implementasikan dalam aspek industri migas. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 3 no.22 tahun 2001 yang mengatur menyentuh tujuan dilaksanakannya pabrik migas. Pendapatan negara menjadi konsen yang krusial dalam pembangunan dan perekonomian suatu negara serta dalam memajukan kualitas hidup warga negara secara keseluruhan. Sebagai negara yang memiliki kekayaan Sumber daya Alam yang melimpah khususnya minyak dan gas bumi, Indonesia mengandalkan penghasilan minyak dan gas bumi sebagai salah satu pendapatan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam UUD 1945 tercermin dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan industri migas berkontribusi secara maksimal terhadap pendapatan negara, sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi nilai-nilai kebangsaan pada UUD 1945. Dampak pendapatan negara dari pabrik migas di Indonesia sangat dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, terbilang dari urusan penyelenggaraan sumber daya alam, pembagian hasil produksi, dan penerimaan pajak dan royalti. Selain itu, perlindungan hak-hak konsumen dan keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam konteks industri migas.

Kata kunci: UUD 1945, Perekonomian, Minyak dan Gas

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, terbagi dalam banyak wilayah. Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 akan sumber daya alam diatur maka “tanah, air, dan pendapatan alam yang tercantum di dalamnya wajib mengendalikan dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. (Stefanus, 2011). , sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang menyediakan oleh alam dan memanfaatkan bagi manusia untuk menjamin kelangsungan hidupnya (Hakim, n.d.). Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Minyak mentah dianggap penting untuk banyak bahan mentah yang menunjang perekonomian negara (Statistik, 2023). Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan tempat pengelolaan sumber daya energi bahan bakar, pabrik migas merupakan salah satu pabrik pemberi moneter negara melalui kegiatan ekspor migas. Selain itu, pabrik migas memberikan kontribusi di jumlah bidang untuk mengembangkan lapangan kerja dan mengembangkan prasarana di wilayah kerja (Pakpahan et al., 2019).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan mineral antara lain emas, perak, tembaga, minyak dan gas, batu bara dan lain-lain. Salah satu buatan bumi Indonesia yang membawa perkembangan pesat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ialah minyak bumi dan gas bumi yang menghadirkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Operasi pertambangan di Indonesia menghasilkan minyak dan gas alam, yang merupakan sumber daya alam yang penting, berkelanjutan (habis), serta produk penting yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Bahan bakar minyak merupakan salah satu elemen penting yang diperlukan untuk memenuhi keinginan warga, baik di negara miskin, negara berkembang bahkan di negara maju.

Bahan bakar minyak ialah kebutuhan dasar industri di seluruh dunia, namun bahan bakar minyak ialah sumber daya yang tidak terbarukan. keperluan akan bahan bakar minyak baik untuk bahan pabrik maupun transportasi makin hari makin meningkat dengan mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan hal ini dapat menyebabkan kekurangan bahan bakar minyak. Oleh karena itu, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 dirancang untuk membuat pertumbuhan, kenyamanan, dan kedamaian warga. Rumusan UU Migas juga menaruh keputusan kejahatan. Keputusan kejahatan diperoleh dalam Bab XI yakni Pasal 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58..

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia terus memproduksi minyak dan gas bumi untuk menunjang pendapatan pemerintah. Kegiatan hulu merupakan

kegiatan yang meliputi pencarian dan penyalahgunaan. Pencarian geologi ialah usaha yang berniat untuk mengumpulkan informasi tentang perihal geologi untuk mencari dan memperkirakan menyimpan minyak dan gas bumi di wilayah kerja, sedangkan penyalahgunaan ialah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan minyak mulai dari pengeboran hingga pengelolaan minyak gas.

Selain kegiatan hulu juga dilakukan pengerjaan hilir, yaitu suatu usaha yang kegiatan pokoknya atau berdasar pada pengerjaan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, wajar jika dibuat suatu badan pengawas yang mengatur dan mengendalikan pemasokan dan menyalurkan bahan bakar minyak dan gas bumi dari kegiatan jadi berikut. Saat ini kita mengetahui bahwa penyelenggaraan industri migas tentunya merupakan wujud pemenuhan nilai-nilai Undang-Undang Tahun 1945 sebagai wujud menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, pemerintah selalu berusaha memaksimalkan hasil produksi minyak dan gas Indonesia..

Pabrik minyak dan gas bumi memegang tugas berarti untuk Indonesia karena merupakan asal mula pencarian APBN dan diserahkan kontribusi terhadap perekonomian domestik di daerah dimana minyak dan gas bumi di penyalahgunaan, diproduksi, memurnikan dan didistribusikan. Selain itu, peran terbesar industri migas adalah produksi energi (terutama bahan bakar) yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan di seluruh Indonesia..

Perusahaan migas harus terus meningkatkan operasionalnya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga dapat mendorong keberlanjutan, kesejahteraan lingkungan di wilayah operasinya dan meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Investasi perbaikan industri migas adalah kualitas hasil usaha hilir dan kecukupan target produksi yang harus dicapai dengan mengandalkan teknologi yang ada sehingga dapat terus meningkatkan pendapatan negara..

Undang-Undang Dasar Industri Minyak dan Gas Bumi Tahun 1945 ialah kerangka hukum yang mengatur seluruh aspek operasional industri minyak dan gas Indonesia, mulai dari operasional bisnis hingga proses distribusi dan penjualan. Selain itu, konstitusi (1945) mengatur bahwa semua kekuasaan harus tunduk pada kontrol konstitusional dan hukum. Di era globalisasi ini, instansi pemerintah harus terus meningkatkan kualitas industri migas sebagai wujud implementasi nilai-nilai UUD 1945..

UU Perminyakan Nomor 22 mengutarakan maka minyak bumi dan gas bumi ialah sumber daya alam strategis dan merupakan aset penting tak terbarukan yang dikuasai negara, mengatur hajat hidup orang banyak dan memiliki tugas berarti dari perekonomian negara, maka pengelolaannya dapat menghasilkan keuntungan banyak hal; bisa Sebisanya mungkin.

kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat (Agus, 2023) di samping itu, berlandaskan deskripsi di atas, peneliti ingin berdiskusi implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam UUD 1945 sebagai aplikasi untuk menganalisis dampak pendapatan negara terhadap bangsa. Anggaran, operasional industri minyak dan gas di Indonesia. Melakukan penelitian dari berbagai sumber.

METODE PENELITIAN

Dari karya ini, penyusun menerapkan metode penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dari studi literatur. Tinjauan pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari referensi yang berkaitan dengan penulisan artikel ini. Tinjauan literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber informasi dari buku referensi, e-book, dan informasi dari usaha yang berhubungan dengan penulisan. Tabel 1.1 menunjukkan hasil beberapa tinjauan literatur jurnal dan literatur yang diperoleh dari media elektronik dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan.

.Tabel 1. 1 Hasil Studi Literatur Dari Beberapa Karya Tulis Yang Memiliki Keterkaitan

NO	JUDUL	PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Implikasinya Terhadap Makroekonomi di Indonesia	Widia Wardani,Suriana, Siti Ummi Arfah, et.al. (2022)	Kedua artikel ini sama- sama membahas mengenai perekonomian indonesia	Membahas mengenai inflasi yag berdampak pada harga BBM
2	Analisis Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Harga Bahan Bakar Minyak Indonesia	Dimasti Danu (2022)	Pada kedua artikel ini memiliki persamaan dalam pembahasan dampak pendapatan Indonesia yang disebabkan oleh Sumber Daya Alam	Pada Artikel terdahulu ini lebih spesifikasi terhadap pengaruh konflik terhadap pendapatan negara, sedangkan penulisan ini mengacu pada pendapatan negara dari industry migas
3	Pengaruh ekspor Migas Dan Non Migas Terhadap	M. Ummar Maya Putra & Syafrida Damanik (2017)	Dampak dari industri minyak dangas terhadap	Pembahasan lebih detail pada devisa

	Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia		Pembangunan ekonomi di dalam negeri dan membahas mengenai nilai UUD 1945	negara serta pada penulisan ini bertumpu pada UUD 1945 No. 13 Tahun 1968
4	Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Nasional Dan Perpajakan Di Sektor MInyak Dan Gas Bumi	Alivo Pradana, Aulia Desi Wulandari et.,al. (2020)	Pembahasan dari kedua artikel ini yaitu mengenai pendapatan perekonomian negara yang dihasilkan dari migas	Pembahasan lebih menyeluruh mengenai perhitungan pajak dari industri migas dan pada jurnal ini disertai pembahasan dari UUD 1945 No. 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan
5	Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018	Weni Susanti, Indrawati Mara Kusuma et.,al.(2021)	Membahas mengenai pengaruh penghasilan Minyak dan Gas Bumi Terhadap pendapatan Negara serta dalam artikel ini sama-sama membahas mengenai UUD No.22 Tahun 2001	Pada penulisan terdahulu ini terfokus pada pembahasan pengaruh paham teori terhadap harga saham serta pada artikel ini disertakan dengan pembahasan UUD No.8 Tahun 1971
6	Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dan Volume Perdagangan Saham (Studi pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Alviya Rahayu, Rachma Agustina (2022)	Membahas dampak yang diterima oleh Masyarakat dari kegiatan industri migas serta membahas ke ekonomian yang mempengaruhi pendapatan Indonesia.	Pada penulisan terdahulu pembahasan disertai dengan teori CSR sebagai sarana untuk mengetahui volume perdagangan saham

	Indonesia Tahun 2017-2019)			
7	Pengaruh Ekspor Migas Dan Non Migas Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia	Mashur Razak dan M. Ihsan Indra Jaya (2011)	Pembahasan pendapatan dari industri Migas serta metode penulisan yang dilakukan penulis sama yaitu studi literatur	Pembahasan disertai dengan pengaruh industri non migas dalam pendapatan negara.
8	Pengaruh Harga Minyak Dunia, Inflasi, Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Ulin Nuhaella Almayaa, Wahyu Hidayat Riantoa, Syamsul Hadia. (2021)	Pembahasan mengenai perekonomian dari industri migas serta pengaruh dari adanya industri migas	Pada penulisan terdahulu pembahasan disertai dengan pengaruh inflasi dunia secara signifikan disertai dengan pengaruh konsumsi rumah tangga sedangkan penulisan ini hanya membahas general pendapatan negara dari industry migas
9	Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Serta Dampaknya Bagi Masyarakat	Yumna Zahra Silbaqolbina, Fatma Ulfatun Najicha (2022)	Kedua artikel ini membahas mengenai pengaruh hasil jual Minyak bumi terhadap pendapatan negara dan memiliki landasan hukum pada UUD1945	Pada penulisan ini disertai pembahasan mengenai kenaikan harga BBM yang bertumpu pada UU pasal 33 ayat 3 UUD 1945
10	Pengaturan Production Sharing Contract Dalam Undang-Undang Minyak Dan Gas	Topan Meiza Romadhon (2009)	Pada kedua jurnal ini memiliki persamaan yaitu berlandaskan hukum UUD 1945 mengenai Minyak dan Gas	Pembahasan lebih d0minan terhadap <i>Production Sharing Contract</i> di Indonesia yang dilengkapi

			Bumi No.22 Tahun 2001 UUD1945	dengan UU minyak dan gas bumi Pasal 14,15,16,17 No. 21 Tahun 2001
11	Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia	Lalang Tri Utomo, Achmad Busro, Ery Agus Priyono (2016)	Kedua jurnal ini memiliki persamaan membahas nilai UUD 1945 no.22 tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi	Berfokus pada kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada dampak pendapatan negara. Dan membahas UUD N0.33 ayat 3
12	Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo	Nur Afifah Masuara, Abdur Rahman Adi Saputera (2020)	Bertumpu pada hukum UU no.22 Tahun 2001	Pembahasan mengenai praktik penjual eceran sedangkan penulis membahas mengenai pendapatann sekala negara
13	Analisa Kebijakan Industri Minyak Dan Gas Bumi : Studi Perbandingan Pada Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia Dan Malaysia	Miftah Sobirin(2006)	Kedua artikel ini sam-sama membahas mengenai perekonomian dari industri migas	Pada penulisan terdahulu penulis membahas mengenai perbandingan antar kontrak bagi hasil dengan negara tetangga yaitu Malaysia serta bertumpu pada nilai UUD 1945 pada Nomor 36 Tahun 2004.
14	Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak	Nur Laila Widyastuti &	Membahas peran minyak gas dan bumi terhadap	Membahsa mengenai dampak

	dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia	Hanan Nugroho (2020)	sumber pendapatan	COVID-19 serta melakukan kajian ulang terhadap pyoyek-proyek kilang yang ada di Indonesia
15	Analisis Dampak Kegiatan Industri Hulu Migas Terhadap Pembangunan Nasional Dalam Aspek Ekonomi Regional Indonesia	Siti Fadillah & Edy Susanto (2023)	Pembahasan mengenai dampak terhadap perekonomian Indonesia	Pada penulisan terdahulu tidak mengacu pada UUD 1945

HASIL DAN PEMBAHASAN

HIPOTESIS

1. Hubungan Kegiatan Industri Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pendapatan Negara Di Indonesia.

Dewasa ini kita telah mengetahui bahwa kegiatan industri minyak dan gas memiliki tugas yang memadai besar dalam berekonomi dan juga berdampak besar dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dampak yang dihasilkan dari industry migas ini cukup beragam. Salah satu dampak yang dihasilkan dari industry ini adalah pendapatan negara. Pendapatan negara adalah salah satu sumber utama bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi-fungsi negara. Dengan memiliki pendapatan yang memadai dan stabil, pemerintah dapat mengembangkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kemantapan ekonomi dan politik suatu negara. Pada dasarnya, pengelolaan pendapatan negara yang efektif dan transparan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (Razak & Jaya, 2014)

Dampak dari kegiatan industry migas ini dapat diperoleh secara maksimal apabila dilakukan dengan optimal dan selalu memperhatikan kualitas. Alasan mengapa industri memiliki andil yang cukup besar dari pendapatan negara karena dalam industry ini memiliki nilai jual yang tinggi serta biaya yang dibelanjakan dengan hasil yang

diperoleh sebanding. Industry Minyak dan gas bumi dapat memperoleh yang cukup besar perbandingan dengan pemerolehan industry non-migas. Hal ini diakibatkan karena Indonesia ialah negara yang kaya akan sumber daya alamnya sehingga lebih mudah dan menguntungkan.

Kegiatan industri migas meneruskan partisipasi yang bermakna atas penghasilan negara melintasi pajak, royalti dan dividen dari perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia, dan diharapkan juga dapat dimanfaatkan pendapatan dari industri migas negara. untuk program sosial dan pengentasan kemiskinan untuk memajukan kedamaian warga, khususnya di area yang ialah lokasi penyalahgunaan dan penghasilan minyak dan gas..

Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Sobirin(2006), Sit+6
+i Fadillah & Edy Susanto (2023) dan Mashur Razak dan M. Ihsan Indra Jaya (2011).Menunjukkan hasil maka adanya sumbangsih pengaruh yang cukup besar yang didapat dari kegiatan industry ini dalam pendapatan negara.. Maka dari uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan negara.

2. Korelasi Pengembangan Wilayah Terhadap Pendapatan Negara Yang dilakukan Oleh Industri Migas Sebagai Implementasi Nilai-Nilai kebangsaan UUD 1945

Pengembangan wilayah ialah salah satu pandangan penting bagi sebuah negara. Di Indonesia pengembangan suatu wilayah menjadi perhatian khusus mengingat di negara ini banyak wilayah yang terbilang jauh dari pusat kota yang tentunya hal tersebut menyebabkan wilayah tersebut kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam aspek pengembangan wilayahnya. Dengan adanya industri minyak dan gas bumi akan berdampak positif pada wilayah yang ada di Indonesia ini, hal itu dikarenakan industry minyak dan gas ini tentu akan memperbaiki akses serta area lokasi tempat pelaksanaan industry ini.

UUD 1945 menekankan pentingnya mencapai kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Industri migas dapat menjadi salah satu motor penggerak kemakmuran dengan menyediakan lapangan kerja, investasi dalam infrastruktur, serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan royalti. Namun, implementasi nilai kemakmuran bersama ini memerlukan kebijakan yang memastikan bahwa manfaat dari industri migas tersebut tersebar secara merata di seluruh wilayah, terpenting di area yang menjadi basis operasional industri migas.

Adanya industri migas di wilayah Indonesia diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai UUD 1945 bukan hanya sebagai pendapatan negara melainkan juga untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia, sebagai bentuk asas Pancasila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Alviya Rahayu, Rachma Agustina (2022), Nur Laila Widyastuti & Hanan Nugroho (2020), Ulin Nuhaella Almayaa, Wahyu Hidayat Rianto, Syamsul Hadia. (2021). Menunjukkan hasil bahwa industri minyak dan gas mampu memberikan pengaruh yang positif dalam mengimplementasikan nilai-nilai UUD 1945... Maka dari uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : industri minyak dan gas di Indonesia memiliki penengaruh positif dalam implementasi nilai UUD 1945.

Keterkaitan Artikel Terdahulu Yang Digunakan Penulis Berdasarkan Nilai-Nilai Kebangsaan

Tabel 1. 2 Keterkaitan Jurnal Dengan Implementasi Kebangsaan

No	Kasifikasi Perbedaan (Y)	Implementasi (X)	Analisa Hipotesis
1	Pada jurnal nomor 3 membahas mengenai UUD 1945 No.13 Tahun 1968 mengenai kebijakan keuangan yang ada di Indonesia	Undang-Undang Dasar 1945	Y1 dan X1 memiliki korelasi karena membahas mengenai UUD 1945 pada No.1 Tahun 1968 yaitu kebijakan negara Indonesia mengenai keuangan
2	Pada Jurnal nomor 4 membahas nilai Undang-Undang 1945 Mengenai anggaran pendapatan belanja yang diatur dalam UUD No.1 Tahun 1968		Y2 dan X1 memiliki hubungan karena pada jurnal ini membahas implementasi dari UUD 1945 pada UU NO.4 Tahun 1945 mengenai anggaran pendabatan belanja negara
3	Pada jurnal nomor 5 membahas mengenai pengelolaan minyak dan gas yang dikelolah		Y3 dan X1 memiliki korelasi karena pada artikel tersebut

	oleh PT. Pertamina dalam jurnal in dijelaskan diatur dalam UU No.8 Tahun 1971		terdapat pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 yaitu tentang kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi oleh PT. Pertamina
4	Jurnal nomor 10 membahas mengenai minyak dan Gas Bumi, namun pada jurnal ini dijelaskan secara spesifik dari pasal 14,15,16,17 Nomor 22 Tahun 2001		Y4 dan X1 memiliki hubungan dengan Upaya implementasi Undang-Undang Dasar 1945 karena pada pembahasan ini menjelaskan implementasi dari UU No. 22 Tahun 2001 pada pasal 14,15,16,17 yaitu pembahasan mengenai minyak dan gas bumi
5	Pada jurnal nomor 9 dan 11 membahas mengenai kekayaan sumber Daya Alam pada No.33 ayat 3		Y5 dan X1 memiliki hubungan karena membahas mengenai nilai UUD 1945 pada Pasal 33 ayat 3 yaitu membahas mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya
6	Pada jurnal poin 13 membahas mengenai kebijakan pelaksanaan hilir minyak dan gas bumi yang diatur dalam UUD 1945 Nomor 36 Tahun 2004		Y6 dan X1 memiliki korelasi karena pada jurnal ini membahas mengenai implementasi dari nilai UUD 1954 yaitu tentang

			kebijakan yang diatur untuk kegiatan hilir minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia.
--	--	--	---

Dampak Penghasilan Negara Dalam Kegiatan Industri Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia

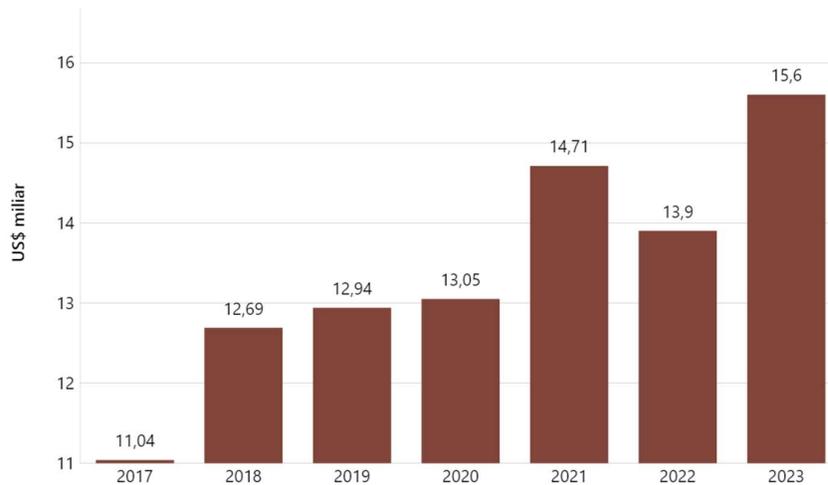
Pendapatan pemerintah dari sektor minyak dan gas pada tahun 2015 (1 Januari hingga 31 Desember 2015) adalah \$11,9 miliar, dengan angka pendapatan minyak sebesar \$5,7 miliar dan pendapatan gas alam sebesar \$6,2 miliar. Jumlah tersebut memenuhi 86% dari target pendapatan negara sebesar \$13,8 miliar (40% dari total pendapatan rantai pasokan minyak dan gas).

Berdasarkan angka-angka tersebut, dapat dikatakan bahwa sektor migas Indonesia merupakan sektor strategis bagi perekonomian negara, menyumbang sekitar 20% pendapatan tahunan pemerintah (2010-2015). Realisasi penerimaan negara sektor migas dalam APBN disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3 APBN Negara dan Realisasi Penerimaan Sektor Migas

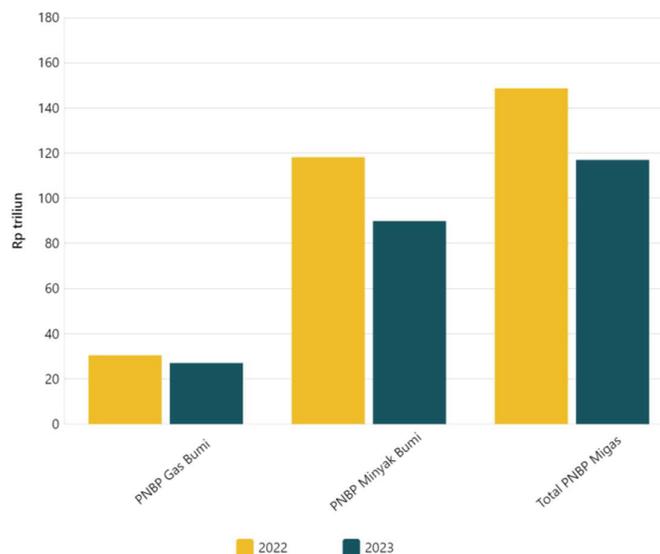
No	Tahun	APBN	Realisasi
1	2011	215335,95	278389
2	2012	231106,49	301629,52
3	2013	257279,25	305569,85
4	2014	286028,60	320254,11
5	2015	326964	136077,98

Minyak dan gas bumi membawakan peran penting dalam investasi negara melalui beberapa mekanisme, seperti pendapatan dari pajak dan royalti yang menjadi sumber utama penerimaan negara, investasi langsung asing yang membawa modal baru, teknologi, dan pengalaman dalam industri migas, serta mendorong pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi eksploitasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah. Selain itu, kehadiran industri migas juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kepintaran dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan pekerja lokal, yang pada masa dapat mewujudkan lapangan kerja baru dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di samping itu, berarti untuk membenarkan maka pemanfaatan sumber daya alam ini dikerjakan secara terus-menerus dan bertanggung jawab, untuk kepentingan jangka panjang negara dan masyarakat. (Rahayu & Agustina, 2022).



Gambar 1. 1 Pendapatan Negara dari Minyak dan Gas Bumi

Saat harga minyak bumi menurun pencarian yang didapatkan oleh Indonesia juga mendapat imbas dari hal tersebut. Hal ini dikarenakan minyak dan gas bumi memang mengantongi kewajiban yang penting dari pendapatan negara. Pada gambar 3.1 merupakan grafik dari pendapatan sebelum harga minyak bumi turun yaitu grafik yang berwarna kuning pada tahun 2022 serta grafik saat harga minyak bumi turun pada tahun 2023 tren dari grafik tersebut menunjukkan penurunan pendapatan negara apabila harga minyak bumi mengalami fluktuasi. Pada grafik dibawah ini menurut Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas mencapai Rp117 triliun pada 2023. (Penerimaan et al., 2024)



Gambar 1. 2 Pendapatan Negara Bukan Pajak Dari Minyak Bumi

Implementasi Pengaruh Industri Minyak Dan Gas Bumi Berdasarkan Nilai-Nilai Dalam UU 1945

Dewasa ini kita telah mengetahui bahwa UUD 1945 merupakan pegangan konstitusi dalam negara Indonesia, hal ini menjadikan UUD sebagai fondasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam industry minyak dan gas bumi. Dari penerapan industri bagian minyak dan gas bumi segala aspek diperhatikan. Pabrik minyak

dan gas bumi ialah salah satu bagian vital dari berekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Berikut adalah aspek aspek yang ada dalam industry migas dalam implementasi UUD 1945:(Journal et al., 2016)

1. Kedaulatan

Nilai kedaulatan yang dijamin oleh UUD 1945 mencakup kedaulatan atas sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Implementasi nilai ini mengharuskan negara untuk mengendalikan dan memakai sumber daya alam tersebut secara sempurna untuk kepentingan rakyat Indonesia.

2. Keadilan

UUD 1945 menegaskan prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, termasuk dalam pabrik minyak dan gas bumi. Implementasi nilai ini mengharuskan adanya distribusi manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal pendapatan, kesempatan kerja, dan pengembangan daerah tempat sumber daya tersebut berada.

3. Kesejahteraan

Nilai kesejahteraan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945 menjadi landasan penting dalam implementasi kebijakan dan praktik dalam pabrik minyak dan gas bumi. Hal ini mencakup usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah eksploitasi, perlindungan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

4. Ketahanan Energi

Pabrik minyak dan gas bumi mempunyai kewajiban penting dari mencapai ketahanan energi nasional. Implementasi nilai-nilai UUD 1945 dalam sektor ini mengharuskan penguatan ketahanan energi melalui kebijakan yang mengamankan pasokan energi, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat infrastruktur energi nasional.

5. Pengelolaan Lingkungan

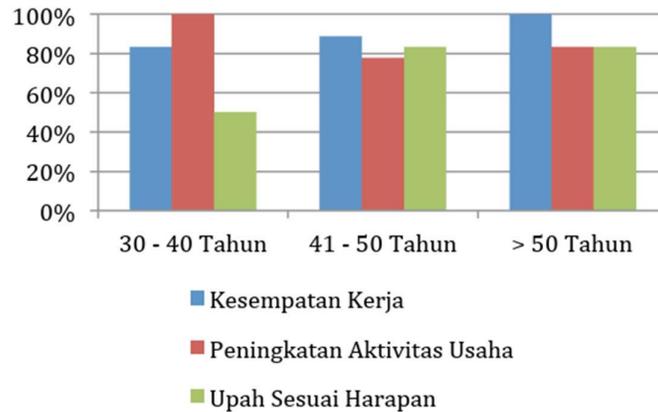
UUD 1945 menerangkan perlunya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam pemakaian sumber daya alam, tercatat dari industri minyak dan gas bumi. Implementasi nilai ini mengharuskan industri untuk mematuhi regulasi lingkungan yang ketat, memenuhi usaha perlindungan lingkungan, serta memangkas dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat lokal.

6. Transparansi

dan Akuntabilitas: Nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga berlaku dari industri minyak dan gas bumi searah dengan UUD 1945. Hal ini mencakup keterbukaan dalam proses pengelolaan, alokasi, dan pendistribusian sumber daya, serta pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan penggunaan dana yang berasal dari industri ini.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, implementasi nilai-nilai UUD 1945 diharapkan dapat memastikan bahwa industri minyak dan gas bumi berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Sehingga dalam implementasi nilai UUD 1945 tidak hanya berfokus dalam pendapatan negara tetapi juga dalam aspek lainnya (Masuara & Saputera, 2020).

Dalam pendapatan ekonomi wilayah sekitar industri minyak dan gas ini juga mendapatkan dampak positif, dengan adanya industri minyak dan gas ini dapat meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat sekitar. Sehingga nilai UUD yang membenahi Menyetuh Minyak dan Gas pada no.22 Tahun 2001 yang terdapat pada pasal 3 yang berbunyi “membuat lapangan kerja, meluaskan kedamaian dan kenyamanan rakyat yang adil dan menyeluruh, beserta tetap melindungi keabdian lingkungan hidup” pada gambar 1.4 menunjukkan pengaruh pada perekonomian yang dirasakan oleh warga sekitar pelaksanaan industri minyak dan gas.



Gambar 1. 3 Dampak Ekonomi Yang Dirasakan Masyarakat

KESIMPULAN

Sektor minyak dan gas bumi mempunyai kewajiban yang vital dalam berekonomi Indonesia, dengan menyumbang sekitar 20% terhadap pendapatan negara setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2015. Pendapatan negara yang diperoleh dari sektor ini, yang berasal dari pajak, royalti, dan investasi langsung asing, menjadi salah satu pilar utama dalam APBN dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia. Namun, fluktuasi harga minyak bumi memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara, seperti yang terjadi pada tahun 2023 ketika harga minyak turun. Oleh karena itu, penting untuk menjamin maka pemakaian sumber daya alam ini dikerjakan secara terus-menerus dan bertanggung jawab, atas memperhatikan efisiensi pengelolaan, perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor minyak dan gas bumi tidak hanya akan tetap menjadi sumber pendapatan negara yang penting, tetapi juga akan memberikan manfaat yang terus-menerus bagi pertumbuhan ekonomi dan kedamaian warga Indonesia secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai UUD 1945 dalam industri minyak dan gas bumi mencerminkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, sambil memperhatikan ketahanan energi dan perlindungan lingkungan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi landasan penting bagi pembangunan nasional, dimana industri migas tidak hanya menjadi sumber pendapatan pemerintah, namun juga harus mendatangkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan sektor ini harus dilaksanakan dalam jernih dan bertanggung jawab, sehingga mengamankan pemanfaatan sumber daya alam secara ideal dan terus-menerus. Selain itu, industri migas memberikan

dampak positif terhadap perekonomian sekitar, meningkatkan kedamaian dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal sesuai dengan prinsip UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terikat. Karena demikian, penerapan nilai-nilai UUD 1945 dalam industri migas secara umum diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia..

Sedangkan berdasarkan hasil ulasan jurnal dan mendapatkan lima belas hipotesis terdapat enam korelasi terhadap penerapan UUD 1945 yaitu membahas UU No. 1 Tahun 2020 mengenai kebijakann keuangan, UU No. 13 Tahun 1968 Menyentuh Anggaran pemasukan Belanja Negara (APBN), UU No. 8 Tahun 1971 yang mengatur perihal penyelenggaraan minyak dan gas oleh PT. Pertamina, UU No.22 Tahun 2022 Pasal 14,15,16,17 yang membahas keseluruhan isi dari pasal tersebut, UU No. 33 ayat 3 mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia dan UU No. 36 Tahun 2004 Mengenai kebijakan peraturan aktivitas Hilir dari industry MInyak dan Gas Bumi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, M. R. (2023). *Konstitusionalisme Pelayana Publik di Era Digital di Negara Republik Indonesia*.
- Journal, D. L. A. W., Utomo, L. T., Busro, A., Priyono, E. A., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., Diponegoro, U., & Belakang, A. L. (2016). Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(4), 1–16.
- Masura, N. A., & Saputera, A. R. A. (2020). Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo. *Madani : Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 3(2), 42–43.
- Penerimaan, R., Bukan, N., & Minyak, P. S. (2024). *Harga Minyak Turun , PNPB Migas Berkurang pada 2023. 2022–2023*.
- Rahayu, A., & Agustina, R. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dan Volume Perdagangan Saham (Studi pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 4(2), 90–96. <https://doi.org/10.33752/jfas.v4i2.408>
- Razak, M., & Jaya, M. I. I. (2014). Pengaruh Ekspor Migas dan Non Migas Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 11(2), 212–222. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/548/534>